

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang tata kelola kenaikan pangkat aparatur sipil negara di badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Kuningan berdasarkan penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa proses kenaikan pangkat di BKPSDM Kabupaten Kuningan sudah berjalan dengan baik. BKPSDM sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi. berdasarkan hasil penelitian di lapangan dari setiap indikator dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada Indikator Akuntabilitas proses ini mendorong pelayanan yang efektif serta efisien merupakan proses kenaikan pangkat di BKPSDM Kabupaten Kuningan bahwa BKPSDM sudah melakukan dengan sistem *paperless* dengan mengirimkan berkas-berkas elektronik dengan sistem online menggunakan aplikasi simpeg. Tahapan yang harus dilakukan oleh PNS yang ingin melakukan kenaikan pangkat adalah dengan cara mengirimkan/mengupload dokumen ke aplikasi simpeg untuk diserahkan ke BKPSDM yang nantinya akan diproses oleh pihak BKPSDM untuk kenaikan pangkatnya. BKPSDM masih berpatokan kepada Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat.
2. Pada Indikator Transparansi BKPSDM Kabupaten Kuningan tata kelola kenaikan pangkat dilakukan secara terbuka dengan selalu mengirimkan Surat kepada setiap SKPD agar mengetahui bahwa ada proses kenaikan pangkat di BKPSDM serta selalu menginformasikan melalui media sosial berupa website dan Instagram. Terkait untuk kompetensi pada umumnya sangat dibutuhkan oleh setiap pegawai baik untuk struktural maupun fungsional untuk menunjang kenaikan pangkatnya.

3. Pada Indikator Partisipasi BKPSDM ketika PNS yang mengajukan kenaikan pangkat tidak lengkap berkasnya ataupun dokumen-dokumennya tim verifikasi selalu menginformasikan kepada PNS untuk segera melakukan kelengkapan berkas dengan status (BTL) apabila tidak segera dilengkapi dan melebihi deadline yang ditentukan berkasnya akan berubah status menjadi (TMS). Dari setiap berbagai unit kerja mengajukan kenaikan pangkat April dan oktober. Untuk April 2023 mengalami penurunan kenaikan pangkat dari oktober 2022.
4. Indikator Koordinasi mengenai isu kenaikan pangkat dilakukan secara 6 kali dalam setahun bahwa setiap PNS menyambut baik terkait kebijakan ini akan tetapi BKPSDM sebagai penyelenggara kepegawaian buatlah aturan yang jelas untuk kebijakan yang akan dilakukan agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.

Hambatan merupakan sebuah tantangan bagi setiap organisasi untuk mampu menghadapinya dengan benar dan bersungguh-sungguh demi tercapainya good governance, Hambatan nya sudah peneliti rangkum dari semua narasumber yang dihadapi untuk proses kenaikan pangkat adalah sebagai berikut:

- a) Belum masanya pegawai itu naik pangkat
- b) Persyaratannya belum lengkap (BTL)
- c) Kemampuan PNS yang kurang paham sistem online
- d) Sistem upload harus kurang dari 2mb
- e) Aturan yang belum sederhana masih berbelit-belit
- f) Angka kredit yang belum memenuhi
- g) Terkena hukuman disiplin
- h) Ujikom/seminar untuk fungsional yang belum memenuhi

Upaya adalah sebuah Gerakan yang dilakukan organisasi maupun instansi untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas BKPSDM melakukan :

- a) Sosialisasi tentang kenaikan pangkat bersama SKPD
- b) Bimbingan teknis terkait sistem kenaikan pangkat

Upaya ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ASN tentang pelaksanaan kenaikan pangkat. Bimbingan teknis yang dilakukan dengan cara mengirimkan surat kepada setiap SKPD dengan perwakilan 2 orang dari setiap unit kerja untuk mengikuti bimbingan teknis di aula BKPSDM Kabupaten Kuningan.

## **5.2 Rekomendasi**

### **5.2.1 Rekomendasi Akademik**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diperoleh dalam penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran agar kedepannya Tata Kelola Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Kuningan dapat lebih baik untuk kedepannya .

- a. Diharapkan agar tata kelola ASN dalam proses kenaikan pangkat melalui online dapat berjalan secara optimal
- b. Lebih ditingkatkan untuk hal sosialisasi maupun bimbingan teknis tentang prosedur kenaikan pangkat agar para pegawai ASN mengetahui tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan
- c. Untuk terkait website data-data tentang kenaikan pangkat dilengkapi agar memudahkan setiap orang untuk melakukan penelitian
- d. Agar prosedur kenaikan pangkat dapat berjalan dengan baik perlu adanya koordinasi berupa komunikasi antara pemohon dan petugas yang bersangkutan agar kendala yang dihadapi dapat teratasi dengan sigap dan cepat.

### **5.2.2 Rekomendasi Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan *insight* baru pemikiran, serta masukan bagi masyarakat ASN yang ingin melakukan kenaikan pangkat dan juga untuk peneliti selanjutnya.